

INTISARI

Sektor perkebunan di Indonesia, menyumbang devisa negara yang cukup besar dari komoditas kelapa sawit, hal ini mendorong tumbuh suburnya kapitalisme investasi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Katingan, meningkatnya pembukaan lahan untuk perkebunan sawit oleh perusahaan-perusahaan besar. Program kemitraan dalam usaha perkebunan sawit hadir, adalah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar Perusahaan Besar Sawit (PBS) beroperasi. Normatifnya, kemitraan dapat dikatakan sebagai penyeimbang antara pertumbuhan sistem kapitalisme yang mencengkram. Program kemitraan harus benar-benar mampu menjadi benteng masyarakat miskin dalam menciptakan kesejahteraan sosial, atau sebaliknya program kemitraan hanya menjadi hegemoni kekuasaan oleh aktor-aktor kepentingan atau aktor kapitalis.

Program ini rawan pada kepentingan aktor dan relasi kekuasaan yang meyimang, terutama di Kalimantan Tengah yang masih baru dalam menjalankan program kemitraan usaha perkebunan, dan sifat kebijakan yang luas terkait aktor seperti; pemerintah, swasta dan masyarakat. Pelanggaran yang terjadi pada implementasi kemitraan antara *das seint* dan *das solent*, sangat terkait dengan kekuasaan, kewenangan, dan relasi aktor yang tergambar pada kuatnya posisi dan daya tawar perusahaan dalam berbagai kasus dan berbagai kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Relasi Kekuasaan dan Kepentingan Aktor dalam kebijakan kemitraan usaha perkebunan, Perkebunan Inti-Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dan Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dibantu dengan analisis ekonomi politik dalam upaya memetakan aktor yang diuntungkan atau dirugikan dalam kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan, relasi kekuasaan berjalan dalam bentuk dominasi dan hegemoni kekuasaan oleh aktor-aktor; 1) Swasta (perusahaan sawit); 2) Pemerintah (birokrat Dinas Perkebunan dan Pemerintah Desa); 3) Kelompok kepentingan (masyarakat kelas menengah yang memegang jabatan tertentu seperti Koperasi), dan hubungan tersebut sangat mengabaikan kepentingan masyarakat kelas bawah. Penyebabnya ialah, kepentingan aktor yang terbentuk cenderung pada kepentingan subjektif (pribadi), dibandingkan kepentingan riil (publik). Kurangnya advokasi untuk masyarakat kelas bawah yang mampu memperkuat daya tawar, meningkatkan pengawasan dan penyeimbang, serta penampung aspirasi.

kata kunci; relasi kekuasaan, kepentingan aktor, kemitraan,

ABSTRACT

The plantation sector in Indonesia contributes substantial foreign exchange from palm oil commodities, which encourages the growth of oil palm plantation investment capitalism in Central Kalimantan, especially Katingan Regency, the increasing clearing of land for oil palm plantations by large companies. The partnership program in the oil palm plantation business is present, as an effort to improve the welfare of the people living around the large palm oil company (PBS). Normatively, partnership can be regarded as a counterweight between the growth of a gripping system of capitalism. The partnership program must really be able to become a fortress of the poor in creating social welfare, or otherwise a partnership program merely becoming a hegemon of power by interest actors or capitalist actors.

*This program is vulnerable to the interests of actors and distorting power relations, especially in Central Kalimantan, which is still new in implementing the plantation business partnership program, and the broad policy nature of actors, such as; government, private and community. Violations that occur in the implementation of the partnership between *das seint* and *das solent* are closely linked to the power, authority and relations of actors reflected in the strength of the company's position and bargaining power in various cases and policies.*

This study aims to analyze the Relationship of Power and Interest of Actors in the policy of partnership of plantation business, Plantation Nucleus Estate (PIR-BUN) and Credit of Primary Cooperative for Members (KKPA) in Katingan Tengah Subdistrict, Katingan Regency. This research uses qualitative research methods, assisted with the analysis of political economy in an effort to map the actors in the advantage or disadvantaged in public policy. The results showed that power relations are running in the form of domination and hegemony of power by actors; 1) Private (palm oil company); 2) Government (bureaucrat of Plantation Office and Village Government); 3) Interest groups (middle class people holding certain positions such as cooperatives), and those relationships strongly ignore the interests of lower class society. The reason is that the interests of established actors tend to be subjective (personal) interests, rather than real (public) interests. Lack of advocacy for lower-class people who are able to strengthen bargaining power, improve supervision and balancing, and accommodate aspirations.

keywords; power relations, interests, partnerships, nucleus estate.